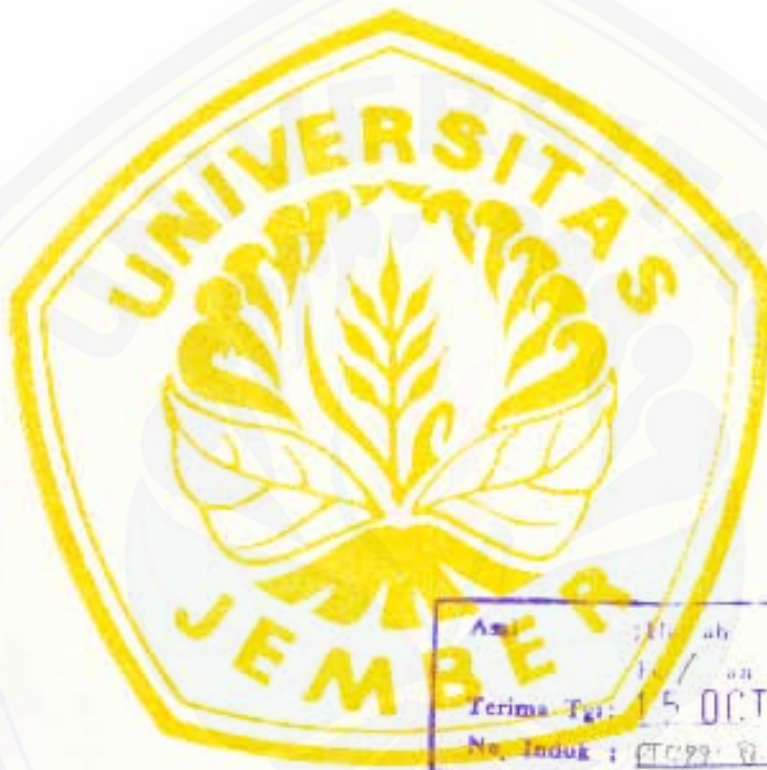


PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD)
DALAM MENGAMANKAN NEGARA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
TAHUN 1950-1959

SKRIPSI



Asal : ...	Klasifikasi : ...
Terima Tgl: 15 OCT 1999	... 1005
No. Induk :

Oleh :

Cicin Kuraesin

9402105030

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
SEPTEMBER 1999



MOTTO:

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا
لَفَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ

"Hai Manusia, janganlah kamu berhasrat akan ketemu musuh dan berdoaalah kepada Allah SWT untuk kedamaian tetapi apabila kamu berhadapan dengan musuh, Maka hadapilah dengan tabah dan ketahuilah bahwa surga terletak dibawah bayangan pedang".

(H.R Bukhari Muslim, Syekh An-Nabhaniy, 1995:257)

Kupersembahkan Skripsi ini, kepada :

1. Ibu dan Bapakku tercinta, terimakasih atas do'a serta limpahan kasih dan pengorbanan demi keberhasilanku
2. Guru-guruku yang selalu kuhormati
3. Saudara-saudaraku tercinta, terimakasih atas do'a serta dukunganya demi tercapai cita-citaku
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan, khusus angkatan '94
5. Almamater yang kubanggakan

**PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN DARAT (TNI-AD)
DALAM MENGAMANKAN NEGARA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
TAHUN 1950-1959**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh :

Nama Mahasiswa : Cicin Kuraesin
Nim : 940 210 5030
Angkatan Tahun : 1994
Daerah Asal : Garut
Tempat/tgl. Lahir : Garut/21 Februari 1975
Jurusan /Program : Pend. IPS/Pend. Sejarah

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

DRS. SOEKEMI
NIP. 130 341 207

Pembimbing II,

DRA. SRI HANDAYANI
NIP. 131 472 786

Telah dipertahankan di depan tim penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai Skripsi

Pada hari : Senin

Tanggal : 27 September 1999

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,



DRS. H. CHOESNOEL HADI
NIP. 130 145 576

Sekretaris,



DRA. SRI HANDAYANI
NIP. 131 472 786

Anggota :

1. DRS. SUMARNO
NIP. 131 403 352



(.....)

2. DRS. SOEKEMI
NIP. 130 341 207


(.....)

Mengetahui

Dekan,


DRS. SOEKARDJO BW
NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segenap rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peranan TNI-AD Dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959".

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
3. Kepala UPT Perpustakaan Pusat Universitas Jember
4. Kepala Perpustakaan Museum Brawijaya Malang
5. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
6. Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
7. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Jember, 27 September 1999

Penulis

RINGKASAN

Cicin Kuraesin, 9402105030, September 1999 Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959, Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas Jember.

Pembimbing : (I) Drs. Soekemi
(II) Dra. Sri Handayani

Kata Kunci : Peranan TNI-AD Dalam Mengamankan Negara, Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet yang menimbulkan pertentangan politik dan pemberontakan di daerah-daerah yaitu RMS, Pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta. Usaha-usaha yang dilakukan TNI dalam menanggulangi peristiwa-peristiwa tersebut berusaha untuk mengembalikan keamanan negara. Hal ini penting diteliti karena dapat memberikan suri tauladan pada generasi muda umumnya dan anggota militer TNI-AD pada khususnya.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah peranan TNI-AD dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959 ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang peranan TNI-AD dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagi peneliti penelitian ini merupakan pengalaman paling berharga dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu sejarah, khususnya yang berhubungan dengan peranan TNI-AD dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959, (2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberikan keleluasan pandangan untuk menguasai materi sejarah nasional khususnya sejarah ABRI, (3) bagi generasi muda penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meneruskan perjuangan bangsa, (4) Bagi pembaca pada umumnya dapat menambah pengetahuan tentang peranan TNI-AD dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959, (5) bagi almamater dapat menambah perbendaharaan khasanah kepustakaan di Universitas Jember khususnya di FKIP, yang merupakan salah satu wujud tri dharma penelitian dan pengembangan ilmu.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 1998 sampai bulan September 1999. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Perpustakaan yang dipakai sebagai tempat penelitian adalah UPT perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan jurusan pendidikan IPS FKIP Universitas Jember dan perpustakaan museum Brawijaya Malang. Metode pengumpulan data, menggunakan metode dokumenter, metode analisis data dengan menggunakan metode filosofis dengan teknik logika komparatif-induktif.

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan, maka hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sejarah berdirinya TNI-AD diawali dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) tanggal 22 Agustus 1945 sampai dengan terbentuknya organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI-AD untuk mengamankan negara melakukan usaha-usaha penumpasan pemberontakan didaerah-daerah seperti RMS, DTTI dan PRRI/Permesta, sedangkan dalam bidang sosial politik ikut serta TNI menjadi anggota Dewan Nasional yang mengusulkan berlakunya kembali UUD 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Berdasarkan kesimpulan di atas dan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut : (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, penulis menyarankan selain menguasai materi sejarah nasional akan lebih baik juga menguasai materi tentang sejarah ABRI, (2) bagi generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa diharapkan lebih giat mempelajari sejarah agar dapat bertindak lebih bijaksana di masa yang akan datang dalam meneruskan perjuangan bangsa (3) bagi pembaca, agar mengetahui dan mendalami tentang sejarah sebagai pedoman dalam kehidupan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, (4) bagi pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan di daerah-daerah untuk menuju masyarakat adil dan makmur, (5) bagi TNI-AD agar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya sebagai dinamisator dan fasilitator negara, (6) bagi almamater, agar lebih memperbanyak literatur sejarah khususnya sejarah ABRI.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan	1
1.2 Definisi Operasional Variabel	3
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan	5
1.3.1 Ruang Lingkup	5
1.3.2 Rumusan Permasalahan	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah Lahirnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ..	8
2.2 Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959	11
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pengertian Metode Penelitian	17
3.2 Metode Penelitian Sejarah	18
3.2.1 Heuristik	19
3.2.2 Kritik	20
3.2.3 Interpretasi	22
3.2.4 Historiografi	23

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian	23
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.5 Metode Analisis Data	26
3.5.1 Teknik Logika Komparatif-Induktif.....	26
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Sejarah Lahirnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ...	28
4.2 Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959	36
4.2.1 Bidang Pertahanan Keamanan	36
4.2.1.1 Penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS).....	37
4.2.1.2 Penumpasan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat	45
4.2.1.3 Penumpasan DI/TII di Jawa Tengah	50
4.2.1.4 Penumpasan DI/TII Daud Beureueh di Aceh	60
4.2.1.5 Penumpasan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.....	67
4.2.1.6 Penumpasan DI/TII Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan	73
4.2.1.7 Penumpasan PRRI/Permesta	78
4.2.2 Bidang Sosial Politik	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran.....	100
KEPUSTAKAAN	102
LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	106
2. Surat Keterangan Izin Studi Literatur	107
3. Lembar Konsultasi Penyusunan Skripsi	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Salah satu organ yang harus dimiliki oleh pemerintahan adalah militer. Tujuan dibentuk militer dalam negara adalah untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan eksistensi negara (Yahya Muhaimin, 1971:15). Dalam Perkembangan setelah kemerdekaan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai suatu alat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari pemberontakan yang berasal dari dalam negeri dan pemberontakan dari luar negeri.

Setelah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Negara Indonesia mengalami pasang surut dengan berlakunya RIS . Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak puas dengan bentuk federasi hasil KMB. Juga Bangsa Indonesia menilai bahwa bentuk Federasi dengan 15 negara bagian ciptaan Belanda didalam RIS dianggap barbau kolonial atau diartikan bahwa Bangsa Indonesia tidak merdeka 100 persen. Ketidakpuasan Bangsa Indonesia ini diwujudkan dengan tuntutan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (G. Moedjanto,1988:60).

Setelah negara RIS (Republik Indonesia Serikat) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 1950. Pada saat itu UUD 1945 tetap tidak digunakan oleh negara Republik Indonesia, karena saat itu berlaku Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal (Dinas Sejarah TNI-AD, 1982:11).

Dalam sistem demokrasi liberal kepala negara (Presiden) tidak dapat dan tidak memiliki tanggung jawab pemerintahan, kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, susunan personalia serta program kabinet berdasarkan suara terbanyak dalam parlemen, dan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen setiap waktu dan parlemen juga dapat dijatuhkan oleh pemerintah setiap

waktu pula. Sedangkan organ resmi dalam parlemen adalah partai-partai politik (Yahya Muhaimin, 1971:65). Pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Kabinet-kabinet tersebut adalah (1) kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), (2) kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), (3) kabinet Wilopo (April 1952-1953), (4) kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-1955), (5) kabinet Burhanuddin (Agustus 1955-1956), (6) Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957), dan kabinet Djuanda (Maret 1957-juli 1959) (Nugroho Notosusanto, 1990:212-220).

Pada masa demokrasi liberal ini sering terjadinya pergantian kabinet sehingga tujuan yang diprogramkan oleh setiap kabinet tidak tercapai dan timbullah kemacetan dalam segala bidang kehidupan. Juga menimbulkan perselisihan golongan, pertentangan-pertentangan politik, akhirnya timbullah pemberontakan-pemberontakan yang akan membawa pada malapetaka nasional. Pergolakan-pergolakan itu terjadi sebagai akibat dari kurang diperhatikannya kepentingan daerah oleh pemerintah pusat. Peristiwa-peristiwa pergolakan itu seperti PRRI (Pemerintahan Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Semesta) (Dinas Sejarah TNI-AD, 1982:16-20). Selain itu muncul pemberontakan daerah yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, pemberontakan ini dikenal dengan pemberontakan DI/TII. Pemberontakan DI/TII ini terjadi diberbagai daerah seperti di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Di Aceh, di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Selatan (Dephankam, 1979:68-73, Mabes ABRI, 1990:61-64).

Dalam menanggulangi peristiwa-peristiwa di atas maka TNI sebagai prajurit yang berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan situasi negara. Langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI-AD berhasil mengembalikan keamanan negara.

Kondisi politik Indonesia pada tahun 1950-1959 mengalami kekacauan. Pada tahun 1950-1959 sering terjadinya pergantian kabinet yang menimbulkan pemberontakan-pemberontakan daerah. Menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut

ABRI melakukan usaha-usaha atau tindakan untuk mengamankan negara. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana peranan TNI-AD pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959, karena akan bermanfaat bagi generasi muda umumnya dan anggota militer TNI-AD khususnya.

Dari alasan di atas, alasan lain yang membuat penulis ingin mengkaji, yaitu karena masalah tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang dianjurkan oleh Sutrisno Hadi dalam bukunya Metodologi Reseach I, yaitu : (1) topik masih dalam jangkauan penelitian, (2) tersedianya bahan-bahan atau data yang diperlukan untuk membahas topik itu, (3) topik cukup penting untuk diteliti, (4) topik cukup menarik minat untuk diselidiki dan dibahas (1985:51). Selain itu adanya kesediaan dosen pembimbing, adanya fasilitas yang menunjang seperti tempat penelitian, tenaga, waktu, dan biaya

Kecuali alasan-alasan di atas, masih ada hal lain dan perlu penulis kemukakan, yaitu bahwa sebagai calon guru sejarah yang profesional, dipersyaratkan menguasai 10 kompetensi dasar guru, yang terutama kemampuan dasar tentang penguasaan materi. Dengan meneliti atau mengkaji Peranan TNI-AD Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959 maka penguasaan materi sejarah ABRI akan tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka penulis merumuskan judul "Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959".

1.2 Definisi Operasional Variabel

Guna mendapatkan kesamaan pandangan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini. Maka penulis perlu memberikan definisi operasional dari judul penelitian ini.

a. Peranan TNI-AD

Pengertian peranan menurut Mely G. Tan dalam buku Koentjaraningrat ialah perilaku seseorang dalam kedudukan tertentu (Koentjaraningrat (Red), 1991:22). Kata perilaku dapat berarti tindakan, dapat pula berarti usaha. Sedangkan istilah kedudukan tertentu, maksudnya dalam keadaan menduduki jabatan.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutsana dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa besar (1987:735). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan diartikan sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam suatu peristiwa (1988:667)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian peranan adalah usaha yang dilaksanakan oleh TNI dalam kedudukan tertentu dalam suatu peristiwa.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan salah satu bagian dari ABRI yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Menurut Doktrin Kekaryaan, TNI-AD adalah sebageaian dari pada ABRI yang tugas pokoknya terutama terletak di dalam marta darat (1966:10).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa TNI-AD merupakan bagian dari ABRI yang mempunyai tugas utama di darat.

b. Mengamankan Negara

Mengamankan berasal dari kata aman yang berarti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan. Mendapat awalan Meng- dan akhiran -kan menjadi mengamankan yang berarti menjadikan tidak berbahaya, tidak rusuh, melindungi, menyelamatkan (Balai Pustaka, 1989:25).

Menurut Mac Iver Negara adalah suatu asosiasi dalam suatu teritori untuk menyelenggarakan ketertiban-ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan memaksa (J. Suyuthi Pulungan, 1994:74). Pengertian negara secara leksikal (1) Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, (2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang terorganisir dibawah lembaga dan pemerintahan yang efektif, (3) mempunyai kekuatan politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Balai Pustaka, 1989:610).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, mengamankan negara adalah melindungi atau menyelamatkan negara dari kekacauan yang datang dari dalam maupun dari luar.

Jadi pengertian peranan TNI-AD dalam mengamankan negara adalah usaha yang dilakukan oleh TNI-AD sebagai bagian dari ABRI yang mempunyai tugas mempertahankan dan memelihara keamanan negara di darat.

Jadi pengertian yang penulis maksudkan dalam judul penelitian Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Mengamankan Negara pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959 ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh TNI-AD sebagai bagian dari ABRI dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959.

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

1.3.3 Ruang Lingkup

Untuk mengarahkan penelitian ini maka perlu adanya penegasan ruang lingkup ditinjau dari segi waktu, tempat yang diteliti dan obyek yang diteliti.

Ruang lingkup waktu penulis teliti yaitu antara 17 Agustus 1950 tepat Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dan berlakunya UUD sementara tahun 1950, dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal sampai tanggal 5 Juli 1959 yaitu dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang isinya

kembali kepada UUD 1945 dan merupakan saat berakhirnya sistem pemerintahan demokrasi liberal.

Perlu penulis tegaskan, bahwa ruang lingkup waktu tersebut tidak bersifat mengikat tetapi bersifat fleksibel, maksudnya dalam hal-hal tersebut menyangkut pula kejadian-kejadian sebelum tahun 1950 dan sesudah tahun 1959.

Menurut Ruang lingkup obyek permasalahannya adalah peranan TNI-AD pada masa demokrasi pada tahun 1950-1959 ini akan memfokuskan pada masalah usaha-usaha dalam mengamankan negara yang dilakukan oleh TNI-AD pada masa demokrasi liberal karena pada waktu itu situasi dan kondisi politik Indonesia sedang mengalami kekacauan.

Adapun daerah atau tempat peristiwa yang penulis teliti adalah daerah atau wilayah tempat terjadinya peristiwa RMS di Maluku Selatan, DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan PRRI/Permesta di Ujung Pandang, dan Sumatera Barat.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah peranan TNI-AD dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959?

Dalam penelitian ini penulis tidak merumuskan hipotesis dengan alasan sebagai berikut (1) penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan apa adanya dari berbagai aspek, (2) menurut Winarno Surakmad didalam penelitian historis yang bersifat deskriptif tidak harus dirumuskan hipotesis penelitian secara eksplisit (1990:124).

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang pasti. Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang Peranan TNI-AD Dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman paling berharga dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu sejarah, khususnya yang berhubungan dengan Peranan TNI-AD dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi liberal Tahun 1950-1959.
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberikan keluasan pandangan untuk menguasai materi Sejarah Nasional terutama sejarah ABRI
3. bagi generasi muda, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meneruskan perjuangan bangsa.
4. bagi pembaca pada umumnya, dapat menambah pengetahuan tentang peranan TNI-AD dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959.
5. bagi almamater, dapat menambah perbendaharaan khasanah kepustakaan di Universitas Jember khususnya FKIP yang merupakan salah satu wujud tri dharma penelitian dan pengembangan ilmu.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Sejarah Lahirnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Sebelum membahas tentang peranan TNI -AD pada masa demokrasi liberal, maka akan dibahas terlebih dahulu tentang sejarah kelahiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Kelahiran TNI tidak lepas dari perkembangan militer pada masa penjajahan Jepang. Kelahiran TNI tidak bersamaan dengan kelahiran negara Indonesia tetapi setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum lahirnya TNI, di negara kita dikenal adanya Heiho dan PETA. Di samping itu dikenal pula KNIL (Koninklijk Nerdelands Indisch Leger) (Muhammad Rusli Karim, 1989:21).

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan tiga kali sidang. Sidang-sidang tersebut yaitu:

- 1) sidang tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan Undang-undang Dasar negara (UUD 1945) dan memilih presiden dan wakil presiden yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta.
- 2) sidang tanggal 19 Agustus 1945, membentuk kabinet sebagai badan eksekutif dengan departemen yang masing-masing dikepalai oleh seorang menteri.
- 3) sidang tanggal 22 Agustus 1945, membentuk komite nasional Indonesia (KNI), dan juga membentuk badan penolong keluarga korban perang, yang mempunyai salah satu bagiannya yang bernama badan keamanan rakyat (Yahya Muhaimin, 1971:26-27).

Sementara itu, pada tanggal 29 September 1945 mendarat tentara sekutu yang dipimpin oleh Letnan Jendral Sir Philip Christison Panglima Besar Allied Forces Nederlands East Indies (AFNEI) dan disertai alat-alat penjajahan Belanda yaitu Nederlands Indies Civil Administration (NICA) yang merupakan persiapan untuk

pengambilalihan kekuasaan dari tangan sekutu ke pihak Belanda (Dinas Sejarah Militer TNI-AD, 1978:55-57).

Pada saat barisan-barisan bersenjata sedang meluculi tentara Jepang diberbagai daerah dan pertempuran-pertempuran melawan NICA sudah terjadi dikota-kota besar, dan pasukan-pasukan sekutu mendarat untuk membatalkan republik dan mempertahankan kekuasaannya di Indonesia (A.H. Nasution, 1970:125).

Melihat kenyataan ini rupa-rupanya membuat pemimpin kita menyadari perlunya angkatan perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka pemimpin memanggil bekas Mayor KNIL Urip Sumoharjo ke Jakarta, dan Ia diangkat sebagai kepala staf umum yang ditugasi untuk membentuk sebuah tentara. Sehingga tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan sebuah maklumat oleh pemerintah untuk membentuk tentara keamanan rakyat (TKR). Sehari setelah itu pemerintah mengeluarkan Maklumat yang mengangkat Supriyadi sebagai menteri keamanan rakyat. Hal ini diikuti oleh perintah mobilisasi TKR yang dikeluarkan oleh KNIP, pada tanggal 9 Oktober 1945 untuk segera menyatukan, pemuda-pemuda, bekas prajurit PETA, KNIL, Heiho, Kaigu Heiho, Lasykar-lasykar, serta barisan-barisan rakyat lainnya (A.H. Nasution, 1970:125-126 , Dinas Sejarah TNI-AD, 1974: 73-74 ; Yahya Muhaimin, 1971: 29).

Atas prakarsa Markas tertinggi TKR pada tanggal 1 Januari 1946, mengubah Tentara Keamanan Rakyat menjadi "Tentara Keselamatan Rakyat" dan kementerian keamanan rakyat diubah menjadi "Kementerian Keselamatan Rakyat" dan pada tanggal 26 Januari 1946 keluarlah Maklumat pemerintahan yang mengubah Tentara keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (Muhammad Rusli Karim, 1989:23). Selain itu pada tanggal 16 Februari 1946 TKR-Laut diubah menjadi TRI-Laut dan tanggal 16 Juli 1946 TRI-Laut diubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia, berdasarkan penetapan pemerintah no. 6/SD 1946 tanggal 9 April 1946 TKR Pertubungan Udara menjadi TRI-AU yang lebih dikenal dengan AURI (Pusat Sejarah ABRI, 1979: 11-14).

Guna menciptakan adanya kesatuan pimpinan militer maka pemerintah pada tanggal 26 Juni 1946 mengangkat Jendral Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang meliputi tentara Darat, Laut, dan Udara (A.H. Nasution, 1963:285; Yahya Muhaimin, 1971:32).

Situasi negara semakin membahayakan, berhubung dengan aksi-aksi Belanda yang mengancam kehidupan militer dan diplomasi. Dalam menghadapi hal tersebut dipihak Soekarno Hatta-Syahrir menggunakan diplomasi sedangkan dipihak militer menggunakan strategi militer. Sementara itu dalam tubuh barisan sendiri masih terdapat friksi-friksi yang timbul dari lasykar-lasykar rakyat yang berorientasi pada ideologi partai induknya masing-masing. Untuk mengatasi kemelut dalam tubuh militer, maka pada tanggal 5 Mei 1947 pemerintah mengeluarkan Dekrit untuk membentuk panitia yang beranggotakan 21 orang. Organisasi Tentara Nasional Indonesia menghasilkan "Penetapan Presiden". Penetapan yang dikeluarkan 7 Juni inilah membentuk organisasi "Tentara Nasional Indonesia" (Muhammad Rusli Karim, 1989:24).

Demikianlah sejarah lahirnya TNI-AD diawali dengan dibentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang salah satu bagiannya adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang disahkan tanggal 22 Agustus 1945, terjadi perubahan-perubahan yaitu pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), tanggal 1 Januari 1946 dari Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), pada tanggal 26 Januari 1946 dari Tentara Keselamatan Rakyat berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pada tanggal 3 Juni 1947 Tentara Nasional Indonesia berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai sekarang.

2.2 Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959

Dalam transformasi dari bentuk federal ke bentuk kesatuan timbul beberapa usaha ekstrim bersenjata yang mempertahankan bentuk federal yaitu yang berupa pemberontakan Andi Aziz, APRA, dan RMS. Disamping pemberontakan di atas pemerintah harus menghadapi dan menyelesaikan pergolakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan (Dinas Sejarah TNI-AD, 1985:1 ; Yahya Muhaimin, 1971:64).

Demokrasi liberal di tahun 1950 telah menimbulkan instabilitas. Salah satu akibat dengan diberlakukannya sistem demokrasi liberal dibidang Hankam ialah timbulnya pemberontakan karena terbelenggalnya pembangunan di daerah-daerah. Akibat situasi nasional demikian itu melahirkan peristiwa-peristiwa pergolakan daerah seperti pemberontakan PRRI dan Permesta (Dinas Sejarah TNI-AD, 1982:20).

Menanggulangi pergolakan-pergolakan daerah dan mengamankan negara. Usaha yang pertama dilakukan oleh TNI-AD adalah menyelesaikan pemberontakan yang terjadi sebelumnya, yaitu penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan yang memerdekakan diri pada tanggal 25 April 1950. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Soumokil dan anggota KNIL, karena ketidakpuasan terhadap proses kembalinya ke negara kesatuan setelah KMB (Nugroho Notosusanto, 1990:261).

Usaha pemerintah pusat dalam menyelesaikan hal ini mencoba dengan cara damai tetapi misi ini tidak berhasil karena pihak RMS menolak. Pemerintah memutuskan untuk menumpas dengan cara senjata. Sebagai pelaksanaannya dibentuk suatu ekspedisi di bawah pimpinan kolonel Kawilarang. Pendaratan dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950 di Pulau Buru, akhirnya seluruh pulau tersebut dapat dikuasai. Tetapi RMS memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan di Ambon Maluku Tengah. maka pada tanggal 28 September 1950 mendarat pasukan ekspedisi di

Ambon. Melalui pertempuran-pertempuran yang sengit akhirnya kota Ambon dapat dikuasai oleh TNI (Pusat Sejarah ABRI, 1979:65-66).

Situasi dan kondisi negara diperburuk lagi dengan adanya pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Pemberontakan DI/TII ini berusaha untuk mendirikan negara berdasarkan Islam Indonesia, dibawah pimpinan Sukarnaji Marijan Kartosuwiryo dengan cara meningkatkan aksi terornya setelah pengakuan kedaulatan. Gerakan ini muncul pada bulan Agustus 1945, memanfaatkan momentum politik akibat KMB (Mabes ABRI, 1990: 61). Operasi penumpasan terhadap pemberontakan DI/TII dipergunakan taktik pagar betis yang dilaksanakan oleh TNI bersama rakyat. Dengan operasi yang dilaksanakan secara terus menerus, maka pada akhir Mei 1962 seluruh tokoh-tokoh TII satu demi satu menyerahkan diri dan pada tanggal 4 Juni 1962 Sukarnaji Marijan Kartosuwiryo berhasil ditangkap (Saleh As'ad Djanhari, 1979:69).

Bersamaan dengan munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, maka muncul pula pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah yang dilakukan oleh dua organisasi yang bernama Angkatan Umat Islam (AUI), yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdulrahman (Kyai Sunolangu) dan pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Amir Fatah yang bergabung dengan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo. Dalam melakukan pengacauan-pengacauan di Jawa Tengah mereka dibantu oleh Batalyon 423 dan 426 yang memberontak (Mabes ABRI, 1990:62).

Langkah pertama dalam menanggulangi DI/TII di Jawa Tengah, Panglima Divisi Diponegoro memanggil perwira-perwira yang dicurigai untuk diperiksa. Perwira-perwira itu adalah Mayor Munawar, Komandan Batalyon 423 dan kapten Sopyan Komandan Batalyon 426. Pada tanggal 8 Desember 1951 pihak divisi berusaha menangkap Kapten Sopyan, tetapi Kapten Sopyan dan kekuatannya tiga kompi mengadakan pemberontakan (Amrin Inuran, 1971:63). Selanjutnya Divisi Diponegoro membentuk suatu Komando Operasi yang disebut Gerakan Banteng Nasional, selain dibentuk Komando GBN, Letnan kolonel Ahmad Yani membentuk

Pasukan khusus yang disebut Banteng Raiders. Maka tanggal 11 Mei 1952 pertahanan gerombolan di Semedo, Pekalongan, berhasil dihancurkan (Saleh As'ad Djamhari, 1979:70; Setneg, 1986:62 ; Amrin Inran, 1971:65).

Di Aceh terjadi pergolakan terjadi dikarenakan tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah, walaupun latar belakangnya berbeda dengan Jawa Barat tapi akhirnya gerakan ini menyesuaikan diri dengan gerakan Kartosuwiryo, gerakan ini dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh. Maka pada tanggal 21 September 1953, Tengku Daud Beureuh menyatakan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah S.M Kartosuwiryo (Nogroho Notosusanto, 1990:271; Saleh As'ad Djamhari, 1971:70).

Untuk menyelesaikan pergolakan tersebut TNI melancarkan operasi militer satu demi satu kota dapat dikuasai kembali. Penyelesaian terakhir Daud Beureuh dilakukan dengan suatu "Musyawarah Rakyat Aceh" yang diprakarsai oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin pada tanggal 17-28 Desember 1962 (Mabes ABRI, 1990:63; Setneg, 1986:74).

Gangguan keamanan selanjutnya terjadi di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini terjadi karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan bahwa anggota KGSS yang tidak memenuhi syarat militer akan dikembalikan ke masyarakat. Kahar Muzakar merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan tersebut maka ia melakukan pemberontakan (Mabes ABRI, 1990:63). Dan sejak tanggal 17 Agustus 1953 ia merubah nama pasukan menjadi Tentara Islam Indonesia dan memproklamasikan daerah Sulawesi sebagian bagian dari negara Islam Indonesia (Amrin Inran, 1971:66; Dinas Bintal TNI-AD, 1992:62).

Menanggulangi pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan diadakan operasi-operasi yang dilakukan oleh TT. VII dan Komado Antar dan Indonesia Timur. Selain itu dilakukan operasi Merdeka, Operasi Halilintar yang

dipimpin oleh Kolonel Warrow yang dilanjutkan dengan operasi Guntur (Dinas Bital, 1992:63; Saleh As'ad Djamhari, 1979:72).

Pemberontakan DI/TII tidak hanya sampai daerah Sulawesi Selatan tapi menyebarluas sampai ke Kalimantan Selatan, gerombolan ini menamakan diri "Kesatuan Rakyat Yang Tertindas" dibawah pimpinan Ibnu Hadjar (Amrin Imran, 1979:69). Dalam penumpasan gerombolan ini juga dilakukan operasi-operasi secara terus menerus dan pada akhir tahun gerombolan Ibnu Hadjar dapat dimusnahkan dan Ibnu Hadjar sendiri dapat ditangkap tahun 1963 (Mabes ABRI, 1990:64; Setneg, 1986:53).

Pada tahun 1956 timbul gejala pergolakan di daerah-daerah yang menuntut pembangunan daerah. Gejala ini meningkat menjadi gerakan dalam bentuk dewan-dewan, yang aktivitasnya menuntut pemerintah pusat agar memperhatikan pembangunan daerah. Di Sumatera Barat terbentuk Dewan Banteng, Sumatera Utara terbentuk Dewan Gajah, di Sumatera Selatan terbentuk Dewan Garuda, dan di Sulawesi terbentuk Dewan Manguni. Dewan-dewan ini mengambil alih kekuasaan pada daerah setempat (Mabes ABRI, 1990:64). Kegiatan selanjutnya diadakan pertemuan yang diadakan pada tanggal 1-2 Maret 1957 di kantor Gubernur di Makasar (Ujung Pandang) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sipil dan militer. Pertemuan melahirkan "Piagam Perjuangan Semesta" yang dikenal dengan Singkatan Permesta (Saleh As'ad Djamhari, 1979:74).

Kondisi semacam ini juga terjadi di Sumatera Barat (Padang) dengan Dewan Banteng yaitu pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamasikan suatu pemerintahan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara yang dibantu oleh 15 orang menteri. Tindakan padang ini diikuti oleh Sulawesi Utara dibawah Letkol D. J Somba dengan menyatakan menyokong berdirinya PRRI dan memutuskan hubungannya dengan pemerintahan pusat (Yahya Muhaimin, 1971:96).

Pemerintahan dan KSAD pada tanggal 17 Februari 1958 memberhentikan dengan tidak hormat Letkol Ventje Sumual pimpinan Permesta, D.J Somba dan Mayor Runturambi. Setelah itu tanggal 7 Maret 1958 mulai dilancarkan serangan secara besar-besaran terhadap Padang hingga dikuasai pada tanggal 17 April 1958. Seterusnya pada bulan berikutnya Bukittinggi dan Sulawesi Utara dapat dikuasai, dengan demikian pemberontakan daerah secara *de facto* dapat digagalkan dan dikuasai (Yahya Muhaimin, 1971:96-97). Akan tetapi pemberontakan tersebut baru dapat dikatakan berakhir pada tahun 1961 yaitu dengan menyerahnya para pemimoin PRRI-Permesta mememahi seruan pemerintah dengan menyatakan setia kepada Undang-undang Dasar 1945, Manipol dan Revolusi (Dinas Sejarah TNI-AD, 1985:100-105 ; Saleh As'ad Djmhari, 1979:79).

Munculnya atau berperannya militer ke dalam politik dan pemerintahan, ada beberapa faktor yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan memainkan peranan politik. Faktor-faktor ini terletak kepada kehidupan politik dan sistem politik. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) rangkaian sebab yang berhubungan dengan adanya ketidakstabilan sistem politik, (2) rangkaian sebab yang bertalian dengan kemampuan militer untuk mempengaruhi atmosfir kehidupan politik, (3) rangkaian sebab yang berhubungan dengan political perspectives golongan militer (Yahya Nuhaimin, 1971:16).

Partai politik pada masa demokrasi liberal yang memiliki kekuasaan politik dan sekaligus penentu dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan kekuasaan Presiden dan kaum militer kecil sekali, hal ini menimbulkan image yang kurang baik, mengingat jasa kaum militer dan Presiden yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan (Muhammad Rusli Karim, 1989:27).

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi rakyat yang menuntut dibubarkan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Peristiwa ini juga menyangkut tentang persoalan-persoalan di dalam tubuh Angkatan Perang karena pada masa

liberal ini menempatkan Angkatan Perang sebagai alat sipil (Yahya Muhaimin, 1971:17; Setneg, 1986:68).

Pada Masa kabinet Ali Sastroamijoyo terjadi masalah pergantian pimpinan TNI-AD, sehingga banyak anggota perlemen yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap parlemen. Sebagai akibatnya Ali Sastroamijoyo I mengembalikan mandatnya (Setneg, 1986:72).

Melihat situasi dan kondisi negara yang kacau karena adanya pemberontakan daerah dan juga karena sistem yang digunakan tidak sesuai maka untuk mengatasi Presiden mengusulkan diberlakukannya demokrasi terpimpin tapi ide ini ditolak oleh Masyumi, NU, dan Angkatan Bersenjata. Maka diumumkan negara dalam keadaan bahaya (SOB) maka Perdana Menteri Djuanda membentuk Dewan Nasional. Dalam Dewan Nasional yang duduk adalah wakil dari militer dan kepolisian (Muhammad Rusli Karim, 1989:29).

Dalam sidang Dewan Nasional pada bulan Agustus 1958, TNI-AD mengusulkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai pelaksanaan demokrasi terpimpin (Dimas Sejarah TNI-AD, 1982:102-102 ; Yahya Muhaimin, 1971:103-104).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan secara singkat bahwa peranan TNI-AD pada masa demokrasi liberal adalah TNI-AD melakukan usaha-usaha atau tindakan dalam mengamankan negara yaitu melakukan penumpasan terhadap pemberontakan-pemberontakan daerah seperti penumpasan Republik Maluku Selatan, Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan penumpasan terhadap PRRI/Permesta. Selain itu TNI-AD juga ikut berperan dalam bidang politik, ikut sertanya partai IPKI dalam pemilu 1955, duduk sebagai anggota Dewan Nasional yang bertugas sebagai penasehat Presiden dan mengusulkan agar kembali kepada UUD 1945.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Sebelum memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu dibahas pengertian metode penelitian itu sendiri. Menurut Koentjoroningrat dan Fuad Hasan, Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu suatu cara atau jalan. Selubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (1993:7). Pengertian metode adalah cara utama yang digunakan untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu (Winarno Surakhmad, 1990: 131).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian metode adalah suatu cara atau jalan yang digunakan untuk memahami dan menguji serangkaian hipotesis dengan suatu teknik serta alat-alat tertentu.

Penelitian berasal dari kata *research* yang berarti menilai kembali. Hal ini ditegaskan kembali oleh Moh. Nazir secara etimologis kata *research* berarti mencari kembali (1988: 13). Menurut Sutrisno Hadi Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, dimana usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (1989:4). Sedangkan menurut Mohammad Nazir, penelitian adalah suatu pencarian fakta yang menurut metode obyektif yang amat jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum (1988:14).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan mengembangkan, menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian menurut Moh. Ali adalah cara untuk memperoleh atau memecahkan permasalahan yang dihadapi dan pada dasarnya merupakan metode ilmiah atau scientific metode (1985:21). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi berpendapat, metodologi reseach adalah pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah (1986:4).

Berdasarkan pengertian di atas ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau tehnik yang digunakan oleh seorang peneliti melalui cara-cara tertentu untuk menemukan, menganalisis, dan menafsirkan suatu permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menghasilkan suatu dalil atau hukum.

Menurut Mohammad Natsir metode penelitian dikelompokkan menjadi lima yaitu: (1) metode penelitian sejarah, (2), metode penelitian diskritif dan survei, (3) metode penelitian eksperimental, (4) metode penelitian ground reseach, (5) metode penelitian tindakan (1988:54).

Berdasarkan ke lima jenis metode penelitian untuk penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pertama yaitu metode penelitian sejarah atau penelitian historis.

3.2 Metode Penelitian Sejarah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Hal ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian historis. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah berdasarkan para sejarahwan itu pada pokoknya ada empat tahapan yang harus dilakukan.

Sebelum menguraikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah harus menjelaskan pengertian metode penelitian sejarah. Menurut Helius Sjamsuddin metode sejarah dapat diringkas dengan istilah-istilah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah, (2) seleksi dan koreksi, (3) verifikasi dan validasi, (4) penyusunan secara teratur dan penulisan (1996:19-20). Louis Gottschalk mendefinisikan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis

rekaman dan peninggalan masa lampau. Berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menepati proses itu disebut Historiografi. Dengan menggunakan metode historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah) (1983:28). Sedangkan Nugroho Notosusanto memberikan pengertian metode sejarah sebagai suatu prosedur kerja sejarawan untuk memuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan (1971:17).

Berdasarkan pada pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa metode penelitian sejarah sarana atau alat yang harus dilakukan oleh sejarawan dalam mencari sumber, menilai sumber, menafsirkan sumber berdasarkan bahan-bahan atau jejak-jejak yang ditinggalkan di masa lampau. Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah terbagi ke dalam Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein langkah-langkah sebagai berikut: (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) interpretasi, (4) Historiografi (1971:17).

3.2.1 Heuristik

Heuristik yang artinya mencari atau menemukan jejak masa lampau atau jejak sejarah. Heuristik merupakan langkah pertama dalam penulisan sejarah yaitu dalam rangka mengumpulkan dan mencari sumber sejarah. Sedangkan sumber sejarah menurut Louis Gottschalk adalah sesuatu yang digunakan sebagai sumber penulisan atau penceritaan kembali peristiwa masa lampau (1975:45). Sesuai dengan sifat penelitian ini merupakan tahap mencari dan mengumpulkan sumber yang berupa arsip-arsip atau buku-buku.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa heuristik adalah langkah pertama dalam penulisan sejarah untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber sejarah yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian bibliografis, maka sumber yang digunakan adalah sumber tertulis. Sehingga sumber yang dibutuhkan berupa buku-buku yang memuat pendapat para ahli tentang masalah yang diteliti. Adapun sumber tertulis tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu: (1) sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi panca indra yang lain, (2) sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi dengan pandangan mata, yakni seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan atau orang itu memperoleh sumber dari orang lain (Gottschalk, 1986:35). Dari kedua sumber tersebut semuanya dipakai dalam penelitian ini. Sumber sekunder juga dipakai karena mudah didapat juga berfungsi memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber aslinya. Dengan demikian sumber primer mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena sumber primer itu sumber asli yang diperoleh dari saksi mata yang mengalami dalam peristiwa itu atau saksi yang hidup pada waktu peristiwa itu terjadi. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang ditulis oleh orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa seperti A. H. Nasution dalam bukunya Tentara Nasional Indonesia, sedangkan sumber sekunder seperti Saleh As'ad Djamhari dalam bukunya Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang).

3.2.2 Kritik

Langkah kritik digunakan untuk mengadakan penelitian dan analisis terhadap sumber, apakah sumber itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, dapat dipercaya atau tidak, apakah bahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak. I.G Widja menerangkan bahwa langkah selanjutnya setelah menemukan atau mengumpulkan jejak-jejak yang dimaksudkan adalah menilai, menguji dan menyelidiki jejak-jejak tersebut benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan penelitian yang disusun (1988:12). Pengujian sumber sejarah atau kritik sejarah

dimaksudkan untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah yang valid dan reliabel, karena sumber-sumber tersebut masih berupa bahan mentah belaka untuk disusun menjadi fakta sejarah (Nugroho Notosusanto, 1990:134-135).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kritik adalah suatu langkah untuk menilai, menguji dan menyelidiki jejak-jejak sejarah sebagai usaha untuk mendapatkan sumber atau jejak yang benar dalam arti benar-benar asli, benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang akan disusun.

Kritik sejarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern terutama harus menjawab tiga pertanyaan pokok yaitu: (1) apakah sumber itu memang sumber yang kita hendaki, (2) apakah sumber itu asli atau hanya tiruan, (3) apakah sumber itu utuh atau sudah diubah-ubah (Nugroho Notosusanto, 1971: 20-21). Pengujian kritik ekstern dilakukan dua cara yaitu: (1) menentukan pengarang atau penulis dan (2) menentukan tempat dan tanggal bahan sumber yang diterbitkan (Consuelo G. Sevilla, 1996:55).

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat memberikan pengertian bahwa kritik ekstern adalah kegiatan untuk meneliti keaslian sumber data yang diperlukan apakah sumber itu benar-benar asli, benar-benar utuh dan sumber yang kita hendaki.

Kritik intern adalah merupakan kelanjutan dari kritik ekstern, untuk membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan itu memang dapat dipercaya. Cara untuk membuktikannya adalah sebagai berikut: (1) menilai secara intrinsik terhadap sumber-sumber, (2) membandingkan kesaksian dari berbagai sumber (Nugroho Notosusanto, 1971:21-22). Lebih lanjut dikatakan kritik intern dilakukan setelah kritik ekstern untuk membuktikan ketepatan isi sumber yang kita perlukan. Dalam pengujian kritik intern untuk membuktikan isi dari sumber tersebut yaitu dengan cara intrinsik terhadap sumber-sumber, cara ini dilakukan dengan pengujian kemampuan penulis yaitu apakah penulis diakui sebagai penulis yang mampu atau dapat dipercaya oleh penulis dalam bidangnya, dan juga dilakukan pengujian kebenaran

dan kejujuran penulis dalam menerbitkan bahan-bahan atau sumber didorong oleh kepentingan golongan atau individu (Consuelo G. Sevilla, 1996:59-60).

3.2.3 Interpretasi

Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan perlu dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga satu fakta dengan fakta lainnya terlihat sebagai satu rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan sebagai suatu rangkaian bermakna dari kehidupan masa lampau suatu masyarakat atau suatu bangsa (I.G Wijaya, 1988:23).

Nugroho Notosusanto memberikan pengertian interpretasi adalah kegiatan mengadakan penafsiran terhadap fakta-fakta hasil dari pengolahan data pada tahap kritik dengan cara merangkaikan dan menghubungkan antara fakta-fakta sejarah dengan hubungan logis, rasional dan faktual serta keaslian diharapkan akan terbentuk suatu kisah sejarah (1971:23). Pengertian ini didukung oleh Louis Gottschalk sebagaimana yang dikutip oleh Nugroho Notosusanto menjelaskan sebuah fakta sejarah atau historiografi fact adalah

".....a particular derived directly or indirectly from historical documents and regard as credible after careful testing in accordance with the canons of historical method" (1971:22).

Adapun pengertian dari pernyataan di atas adalah fakta sejarah adalah fakta-fakta yang secara langsung maupun tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan fakta-fakta tersebut dapat dipercaya karena sudah diuji dengan norma-norma dari metode sejarah. Berbagai fakta sejarah tadi masih terpisah-pisah oleh karena itu diperlukan interpretasi agar nantinya tersusun kisah sejarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho Notosusanto yang menyatakan bahwa fakta sejarah itu mempunyai dua komponen yang saling berkaitan yaitu fakta dan interpretasi (1984:22).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa interpretasi adalah kegiatan merangkaikan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah sehingga rangkaian fakta ini membentuk suatu kisah sejarah yang kronologis, rasional, dan faktual.

3.2.4 Historiografi

Setelah langkah interpretasi selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah historiografi. Historiografi adalah penyampaian hasil-hasil interpretasi dari analisis terhadap fakta-fakta sejarah ke dalam bentuk atau kisah sejarah secara tertulis. Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah dan merupakan bagian kegiatan dari metode sejarah yang telah disusun secara analisis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (Nugroho Notosusanto, 1984:42).

Metode yang harus digunakan dalam langkah historiografi ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta sebagaimana adanya dengan penekanan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1991:63). Berdasarkan fakta-fakta yang penulis yakini kebenarannya kemudian penulis menyusun secara kronologis, sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa historiografi adalah cara atau usaha untuk menyampaikan hasil kritik, interpretasi, dari analisis terhadap fakta-fakta sejarah yang sudah diyakini kebenarannya, kemudian menyusunnya secara kronologis, sistematis dan logis dalam bentuk karya ilmiah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penelitian sejarah menurut jenisnya dibagi menjadi empat macam yaitu: (1) penelitian sejarah komparatif, (2) penelitian yuridis atau legal, (3) penelitian bibliografis atau kepustakaan (Moh. Nazir, 1988:62). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan penelitian bibliografis atau kepustakaan. Sedangkan tempat penelitian adalah perpustakaan-perpustakaan. Untuk menentukan tempat penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Moh. Ali purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (1997:65). Pengertian ini didukung oleh pendapat Sutrisno Hadi yang menerangkan bahwa purposive sampling adalah menentukan tempat penelitian berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperoleh melalui informasi yang mendahului dan secara intensional hanya mengambil daerah kunci guna mencapai tujuan-tujuan tertentu (1986:62).

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat disimpulkan bahwa pengertian metode purposive sampling adalah secara sengaja menentukan tempat penelitian ini karena sesuai dengan kebutuhan atau keperluan penelitian.

Berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, maka ada beberapa perpustakaan yang digunakan dalam ini. Adapun perpustakaan itu adalah perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan jurusan FKIP Universitas Jember, dan perpustakaan Museum Brawijaya Malang disamping itu penulis menggunakan beberapa buku koleksi sendiri.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter. Suharsini Arikunto menyatakan bahwa suatu penelitian yang bersumber pada tulisan, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumenter (1993:131).

Pendapat ini didukung oleh Hadari Nawawi yang menyatakan metode dokumenter adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama yang berupa arsip-arsip dan termasuk buku tentang

pendapat-pendapat, teori-teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (1991:133).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku, teori-teori dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumenter digunakan karena penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian bibliografis (kepustakaan) karena dalam penelitian ini bersumberkan pada tulisan yang berupa buku-buku, teori-teori, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Menurut Nugroho Notosusanto untuk mempermudah pencarian sumber sejarah, maka sumber sejarah diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu: (1) Sumber benda (bangunan, perkakas, senjata), (2) sumber tertulis (dokumen, literatur, tulisan pada daun lontar), (3) sumber lisan berupa hasil wawancara (1971:18). Dalam penulisan ini digunakan penelitian bibliografis, dengan demikian penulis menggunakan sumber tertulis. Sumber tertulis dibagi dua yaitu: (1) Sumber primer, yaitu kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi panca indra yang lain atau dengan alat mekanis seperti diflalon dan sebagainya, (2) sumber sekunder, yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi dengan pandangan mata, yakni seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (Gottschalk, 1986:35 ; Nugroho Notosusanto, 1971:19).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelas bahwa sumber primer mempunyai kedudukan lebih tinggi, namun demikian bukan berarti sumber sekunder tidak penting. Keduanya sangat penting karena dapat saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno Surakmad yang menyatakan bahwa sumber selander dapat dipakai apabila sumber primer tidak dapat diperoleh (1978:125). Sumber bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi dan data yang bersifat sekunder, yaitu berfungsi memberi informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber aslinya (Kartini

Kartono, 1991:73). Mengingat banyak data yang digunakan dan berasal dari banyak pengarang, maka penulis membagi data tersebut menjadi dua yaitu data pokok dan data penunjang. data pokok adalah apabila sumber tersebut lebih banyak diambil sebagai acuan pokok, sedangkan data penunjang adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi atau menunjang sumber pokok.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data maka langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah mengadakan penilaian atau menguji sumber data dengan kritik yang dilanjutkan dengan langkah interpretasi yaitu mengadakan analisis terhadap data yang berkaitan dengan langkah kritik dan interpretasi.

Dalam penelitian sejarah langkah analisis data yang berkaitan dengan kritik dan interpretasi menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif. Menurut Tabang M. Amirin, berkaitan dengan penggunaan metode sejarah sebagai alat bantu merekonstruksi masa lalu secara ilmiah diperlukan kemampuan berfikir logis dan sistematis sehingga diperlukan metode pemecahan masalah melalui proses berfikir rasional dalam bentuk pemikiran yang mendalam dan terarah. Teknik analisis datanya menggunakan logika induksi, deduksi, analogi dan komparasi (1990:95). Metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang disekidiki secara rasional melalui pemikiran yang mendalam, dan mendasar dengan menggunakan pola berfikir induktif, deduktif, fenomenologis, analisis dan sintesis dengan menggunakan hukum-hukum berfikir (logika) (Hadari Nawawi, 1991:62).

3.5.1 Teknik Logika Komparatif-Induktif

Teknik logika komparatif adalah cara membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena untuk mencari faktor atau situasi yang menyebabkan timbulnya peristiwa tertentu (Moh. Ali, 1971:1). Sedangkan Winarno Surakdnad

berpendapat bahwa logika komparatif adalah cara meneliti hubungan fenomena lebih dari satu yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur dan perbedaan suatu peristiwa (1990:136). Teknik logika komparatif digunakan karena untuk membandingkan data yang satu dengan data yang lain untuk mendapatkan fakta sejarah yang bisa dirangkaikan menjadi kisah sejarah.

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa teknik logika komparatif adalah cara untuk mencari faktor yang menyebabkan muncul suatu peristiwa dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai data yang diperoleh.

Teknik logika induktif adalah cara berfikir yang berlandaskan pada pengetahuan yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa-peristiwa konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1986:42). Selanjutnya Mohammad Ali mengatakan bahwa teknik logika induktif adalah proses berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang beranjak dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum (1987:18).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa logika induktif adalah suatu metode untuk menarik kesimpulan secara umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis data menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk memudahkan suatu permasalahan yang diselidiki secara rasional dan terarah dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena dan data untuk memperoleh fakta sejarah yang kemudian dirangkaikan menjadi kisah sejarah yang kronologis, sistematis dan logis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, tinjauan kepustakaan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan TNI-AD dalam mengamankan negara pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. Dapat dirumuskan seperti di bawah ini:

1. Usaha yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di bidang pertahanan keamanan, melakukan tindakan untuk menumpas pemberontakan di daerah-daerah, yaitu RMS, Pemberontakan DI/TII, dan PRRI/Permesta.
2. Usaha yang dilakukan dalam bidang sosial politik, TNI sebagai anggota Dewan Nasional, karena macetnya sidang-sidang Konstituante dan negara dalam keadaan bahaya, ikut mengusulkan berlakunya kembali UUD 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. bagi mahasiswa calon guru sejarah, penulis menyarankan selain menguasai materi sejarah nasional akan lebih baik juga menguasai materi tentang sejarah ABRI.
2. bagi generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa diharapkan lebih giat mempelajari sejarah agar dapat bertindak lebih bijaksana di masa yang akan datang dalam meneruskan perjuangan bangsa.
3. bagi pembaca, penulis menyarankan agar belajar tentang sejarah masa lampau sebagai pedoman dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.
4. bagi pemerintah, agar lebih memperhatikan pembangunan di daerah-daerah untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

5. bagi TNI-AD, agar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya sebagai dinamisator dan fasilitator negara.
6. bagi almanater, penulis berharap supaya memperbanyak literatur sejarah khususnya sejarah ABRI.



KEPUSTAKAAN

A. BUKU

A.H. Nasution, 1970, Tentara Nasional Indonesia I, Seruling Masa, Jakarta)*

_____, 1970, Tentara Nasional Indonesia II, Seruling Masa, Jakarta)*

_____, 1971, Kekaryaannya ABRI, Seruling Masa, Jakarta

_____, 1977, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3 Diplomasi Sambil Bertempur, Angkasa Bandung.

_____, 1983 Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3 Masa Panca Roba I, Gunung Agung, Jakarta.

_____, 1984, Memenuhi Panggilan Tugas IV Masa Panca Roba Kedua, Gunung Agung, Jakarta)*.

_____, 1997, Bisikan Nurani Seorang Jendral, Mizan, Bandung.

Amrin Imron, Hayun Ugaya, Srisuku dan Tanu Suherly, 1971, Sejarah Perkembangan Angkatan Darat, Depatiemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI)*.

Anonim, 1999, TNI Abad XXI Redefinisi Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa, Jasa Buma, Jakarta.

Dinas Sejarah Militer TNI-AD, 1978, Sejarah TNI-AD 1945-1973 (1), Dinas Sejarah Militer TNI-AD, Jakarta.

_____, 1979, Sejarah TNI-AD 1945-1973 (2), Dinas Sejarah Militer TNI-AD, Jakarta)*

Dinas Sejarah TNI-AD, 1974, Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah dan Penumpasannya, Dinas Sejarah TNI-AD, Bandung)*

_____, 1982, Sejarah TNI-AD 1945-1973 (4), Dinas Sejarah TNI-AD, Bandung.

_____, 1985, Sejarah TNI-AD 1945-1947 (3), Dinas Sejarah TNI-AD, Bandung.

- _____, 1985, Penumpasan Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo Di Jawa Barat, Dinas Sejarah TNI-AD, Bandung)*
- Fachran Arly, 1990, Analisa Kekuatan Politik Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- G. Mardjanto, 1988, Indonesia Abad Ke-20 Jilid 2 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III, Kanisius, Yogyakarta.
- Gotschaik, Louis, 1986, Mengerti Sejarah, (Terjemahan Nugroho Notosusanto), Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Helius Sjamsuddin, 1996, Pengantar Ilmu Sejarah, Depdikbud, Jakarta.
- Hendri Supriyatomo, 1994, Nasution Dwi Fungsi ABRI Dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik, Sebelas Maret University, Surakarta)*.
- Jusup A. Puar, 1956, Republik Maluku Selatan, Bulan Bintang, Jakarta)*.
- J. Suyudhi Pulungan, 1994, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mabes ABRI Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1990, Sejarah Singkat Perjuangan ABRI 1945-1990, Mabes ABRI Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta.
- Mabes TNI-AD, 1978, Penumpasan Pemberontakan Sparatisme Di Indonesia, Dinas TNI-AD, Bandung)*.
- Mely G. Tan, 1977, Masalah Perencanaan Penelitian Sosial, dalam Koentjaraningrat (Red), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Ali, 1987, Penelitian Kependidikan Prosedur dan strategi, Angkasa, Bandung.
- Mohammad Nazir, 1985, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Nur El Ibrahimy, 1986, Tengku Muhammad Daud Beureueh, Gunung Agung, Jakarta)*

- Muhammad Rusli Karim, 1989, Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia 1965-1979, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Nazaruddin Sjamsuddin, 1989, Intergrasi Politik Di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Nugroho Notokusanto, 1971, Norma-norma Dasar Penelitian Sejarah, Pusat Sejarah ABRI Dephankam, Jakarta.
- _____, 1984, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman), Yayasan Idayu, Jakarta.
- Payung Bangun 1996, Koisioner Maludin Simbolon Liku-liuku Perjuangan Dalam Pembangunan Bangsa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saleh Ag'ad Djamhari, 1979, Ihtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang), Dephankam Pusat Sejarah ABRI, Jakarta)*.
- Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1990, Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sekretaris Negara RI, 1986, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949, Pt. Cipta Lantoro Gung Persada, Jakarta.
- _____, 1986, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964 Jilid II, Pt. Cipta Lantoro Gung Persada, Jakarta.
- Sevilla G Consuelo, (Penerjemah Alimuddin Tuwu), 1993, Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soebijono, dkk, 1992, Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suhutini Arikunto 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sundhaussen,UH, 1982, Politik Militer Indonesia Menuju Dwi Fungsi ABRI 1945-1967, LP3ES, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1986, Metode Reseach I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

- Syekh An-Nabhaniy, 1995, Ringkasan Ridhaus Sholihin, Darul Hikmah, Jakarta.
- Van C Dijk, 1983, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Grafiti Pers, Jakarta
- Winarno Surakmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik, Tarsito, Bandung.
- W.I.S Poerwadarminta, 1987, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya Muhaimin, 1971, Perkembangan Militer Dalam politik di Indonesia 1945-1966, Gajah Mada University, Yogyakarta)*.

D. MAJALAH

- Amir, 1998, Mencelusuri Sejarah Dwi Fungsi ABRI, dalam Sena, Oktober (No.10 Th VIII), hal 20-22.
- Bambang Bujono, 1985, ABRI Terus di UH, dalam Topik 21 Agustus, (No. 32 Th XV) hal 37-40.
- Suhaeni, 1992, Operasi Kilat Mengakhiri Petualangan Gembong DI/TII Kahar Muzakar, dalam Pinaka Wira Tama, (No.12/IV), hal 57-73.
- Tempo, 1985, Akhir Perjalanan Sebuah Angkatan, dalam Tempo, (No.32 Th XIV), hal 37-41.

Keterangan)* Buku pokok

Matrik Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	PERMASALAHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
NI-Masa jidwan	2 1. Peranan TNI-AD 2. Mergamakan Negara	3 Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah Sifat Penelitian: Penelitian Kepustakaan	4 Bagaimana Peranan TNI-AD dalam mengamankan negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959?	5 a. Buku Pokok: 12 buah b. Buku Penunjang: 37 buah	6 a. Penentuan Tempat penelitian: Purposive Sampling b. Pengumpulan Data Metode Dokumenter c. Analisis Data : Teknik: Logika Komparatif-inkitatif



UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kalimantan III/24 PO. BOX 198 Jember 68121
Telp. (0331) 83860, 88261 Fax. (0331) 88261
E-mail: lib-unoj@indo.net.id

Lampiran II

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

NOMOR : 343/DT.32.Hib/2120'99

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- Nama : CICIN KURAESIN
- NIM : 9402105030
- Jur/Program : PEND. IPS/SEJARAH
- Fakultas : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- Angkatan : 1994

Terhitung mulai bulan FEBRUARI sampai bulan SEPTEMBER telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Skripsi
8-2-1999	x	x		
22-2-1999			x	
13-3-1999	x	x		
17-3-1999	x		x	
6-4-1999			x	x
13-4-1999	x	x		
9-5-1999	x		x	x
8-7-1999			x	
22-7-1999	x	x		
3-8-1999		x		x
11-8-1999	x		x	

Diklan surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 September 1999
Asn. Kepala

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : Ciclin Kurniasin
 Nim / Jurusan / Angkatan : 9402105030 / Pend. IPS / 1994
 Judul Skripsi : Percinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Menjamin Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1990 - 1999

Pembimbing I : Drs. Saekemi
 Pembimbing II : _____

KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Tt. Pembimbing
1.	Selasa, 16 Maret 1999	Judul, Matrik dan daftar isi	
2.	Rabu, 17 Maret 1999	Bab I, II dan III	
3.	Senin, 19 Maret 1999	Revisi bab I	
4.	Selasa, 23 Maret 1999	Revisi Bab III	
5.	Senin, 3 Mei 1999	Bab I, II dan III	
6.	Sabtu, 28 Agustus 1999	Revisi Bab I, II dan III	
7.	Selasa, 31 Agustus '99	Bab IV	
8.	Selasa, 6 September '99	Bab IV, Bab V	
9.	Rabu, 8 September '99	Bab V dan Ringkasan	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN SKRIPSI.

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : CICIN Kuraesin
 Nim / Jurusan / Angkatan : 9402105030 / Perel IPS / 1994
 Judul Skripsi : Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Mengamankan Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950 - 1959

Pembimbing I : _____
 Pembimbing II : Dra. Sri Handayani

KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Tl. Pembimbing
1.	Senin, 8 Maret 1999	Judul dan Matrik	<u>sh</u>
2.	Senin, 15 Maret 1999	Matrik Penelitian; Daftar Isi	<u>sh</u>
3.	Selasa, 23 Maret 1999	Bab I, II, dan III	<u>sh</u>
4.	Kamis, 8 APRIL 1999	Bab I, II, dan III	<u>sh</u>
5.	Selasa, 13 APRIL 1999	Bab I, II, dan III	<u>sh</u>
6.	Senin, 9 Agustus 1999	Revisi bab I, II dan III	<u>sh</u>
7.	Rabu, 18 Agustus 1999	BAB IV	<u>sh</u>
8.	Senin, 23 Agustus 1999	BAB V dan Ringkasan	<u>sh</u>
9.	Kamis, 26 Agustus	Revisi BAB IV	<u>sh</u>
10.	Selasa, 31 Agustus 99	BAB V dan Ringkasan	<u>sh</u>
11.	Rabu, 8 September	BAB V dan Ringkasan	<u>sh</u>
12.			
13.			
14.			
15.			

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN SKRIPSI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Cicin Kuraesin
2. Tempat/tanggal lahir : Garut, 21 Februari 1975
3. Agama : Islam
4. Nama Ayah : Akah
5. Nama Ibu : Teja Ningsih
6. Alamat
 - a. Asal : Rt 01/Rw 03 Dungusiku, Louwigoong, Garut
 - b. di Jember : Jln. Kalimantan X/No. 15

B. Riwayat Pendidikan (Sekolah, Luar sekolah)

No	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1	SDN 2	Dungusiku	1986
2	SMPN 1	Louwigoong	1989
3	SMAN	Louwigoong	1993
4	Kursus Bahasa Inggris	Garut	1994
5	Kursus Komputer	Jember	1999

C. Kegiatan Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1	Pramuka SMP	Louwigoong	1989
2	Pramuka SMA	Louwigoong	1993
3	AMPI	Louwigoong	1993
4	HMP Sejarah	Jember	1996